

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor perbankan merupakan bidang usaha yang dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di suatu negara. Oleh karena itu, perbankan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak. Dengan demikian, sektor perbankan harus mampu mengelola dana masyarakat secara baik dan benar.

Bank merupakan lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak kelebihan dana (*surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan. Bank mempunyai fungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga perantara, bank mendasarkan kegiatan usahanya pada kepercayaan masyarakat. Maka bank juga disebut sebagai lembaga kepercayaan masyarakat (*agent of trust*).

Selain berfungsi sebagai *agent of trust* bank juga berfungsi bagi pembangunan perekonomian nasional (*agent of development*) dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Oleh karena itu karena pembiayaan adalah salah satu aktivitas yang sangat penting bagi kelangsungan bank maka apabila pengelolaannya tidak baik akan menimbulkan permasalahan dan berhentinya usaha bank, dikarenakan dari aktivitas ini akan diperoleh sumber pendapatan utama bagi bank.

Namun pada praktiknya tidak seluruh pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan bank berjalan dengan baik. Dalam suatu waktu bank juga tidak akan bisa terlepas dari resiko pembiayaan. Resiko pembiayaan terjadi apabila bank gagal untuk memperoleh kembali kewajiban dari pinjaman yang diberikan. Selain itu, kualitas pembiayaan juga harus diperhatikan karena jika terjadi pembiayaan bermasalah tentunya akan mengancam tingkat kesehatan bank.

Ada 2 faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah. Faktor yang pertama yaitu faktor internal, dimana faktor yang timbul dari Bank Umum Syariah itu sendiri, contohnya kurangnya selektif dalam menganalisa nasabah pada saat survei, pendampingan kurang seimbang, dan analisa keuangannya kurang baik. Sedangkan dari faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari pihak luar lembaga. Contohnya seperti karakter nasabah yang sulit untuk membayar angsuran, bencana alam, dan faktor perekonomian sekitar. Faktor perekonomian daerah atau regional bisa meliputi inflasi, produk domestik bruto, indeks pembangunan manusia, dan upah minimum provinsi.

Di setiap kota, perkembangan bank syariah berbeda-beda. Perkembangan dilihat dari seberapa besar tingkat kemacetan pembiayaan (NPF). Perkembangan nilai-nilai NPF dapat dilihat dari tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Nilai NPF di Pulau Jawa

Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Banten	4.05%	2.62%	2.15%	1.82%	4.01%	5.73%
DKI Jakarta	5.09%	4.90%	3.08%	2.64%	4.57%	4.05%
Jawa Barat	3.77%	2.61%	2.68%	3.01%	5.32%	4.93%
Jawa Tengah	2.74%	3.99%	2.87%	2.81%	2.91%	3.58%
DIY	2.84%	3.16%	1.67%	1.51%	5.48%	2.22%
Jawa Timur	1.10%	1.40%	1.49%	2.20%	5.02%	4.67%

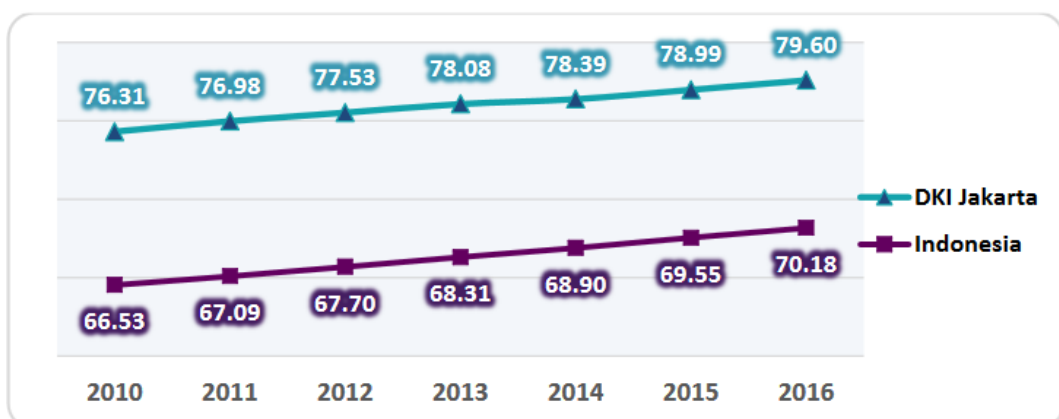
Sumber data: Otoritas Jasa Keuangan, diolah, 2017

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa selama rentang tahun 2010 sampai 2015 NPF di pulau Jawa mengalami fluktuasi untuk beberapa rentang tahun. NPF pada masing-masing provinsi ini mengalami fluktuasi yang sangat signifikan, dapat dilihat pada gambar di atas. Hampir semua provinsi-provinsi ini pernah mencapai angka NPF diatas 5 persen. Hal ini menandakan bahwa Bank Umum Syariah di pulau Jawa sempat mencapai batas maksimum kesehatan Bank yakni 5 persen.

Pada umumnya, pembiayaan bermasalah lebih besar dipengaruhi oleh faktor eksternal, karena keadaan perekonomian sekitar yang setiap tahun selalu mengalami perubahan dan pertumbuhan. Terutama di pulau Jawa sebagai pusat perekonomian negara Indonesia. Pulau Jawa terdapat 6 provinsi yang memiliki ciri khas wilayah masing-masing. Seperti DKI

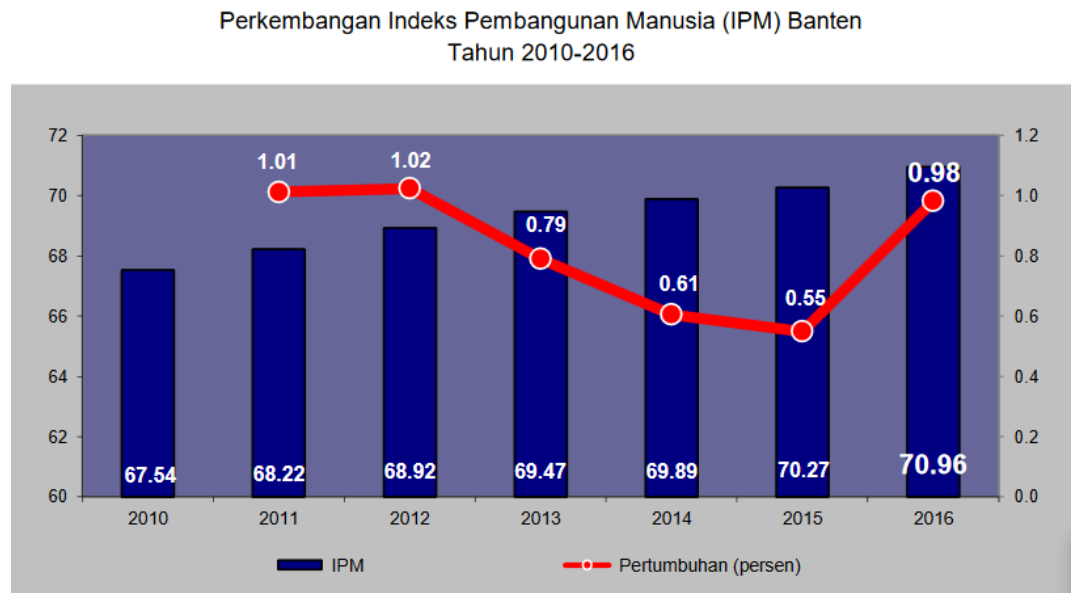
Jakarta dan Banten yang terkenal dengan wilayah perindustrian. Daerah Istimewa Yogyakarta yang terkenal dengan kota wisata, dan Jawa Timur, Jawa Barat dan Jawa Tengah dengan ciri khas kota pertanian. Dari perbedaan wilayah inilah penulis tertarik untuk meneliti faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah di 6 provinsi pulau Jawa. Karena melihat data perkembangan NPF ditabel 1.1, seharusnya provinsi DKI Jakarta dan Banten memiliki angka NPF yang rendah jika indikatornya dilihat dari indeks pembangunan manusia karena provinsi DKI Jakarta dan Banten merupakan kota industri dan jika dikategorikan dalam indeks pembangunan manusia termasuk dalam kategori “tinggi” yang artinya dapat dikatakan provinsi sejahtera. Dan provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan Jawa Timur seharusnya memiliki angka NPF yang tinggi karena bukan kota industri dan dilihat dari indeks pembangunan manusia keempat provinsi tersebut masuk dalam kategori sedang. Berikut beberapa perwakilan grafik indeks pembangunan manusia:

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta dan Indonesia, 2010-2016



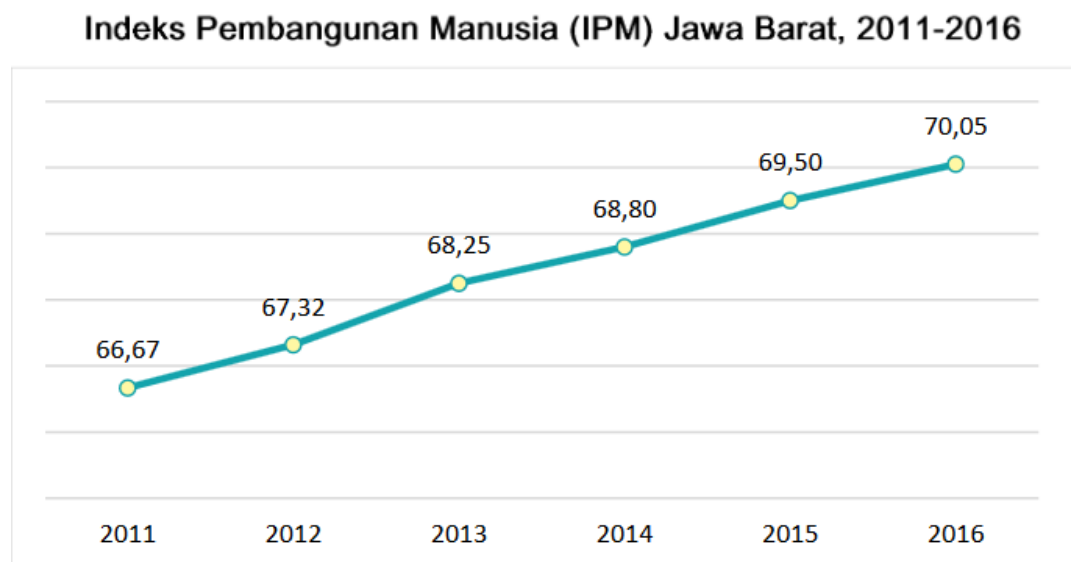
Sumber: Badan Pusat Statistik Jakarta, 2017

Gambar 1.1 Grafik Indeks pembangunan Manusia DKI Jakarta dan Indonesia 2010-2016



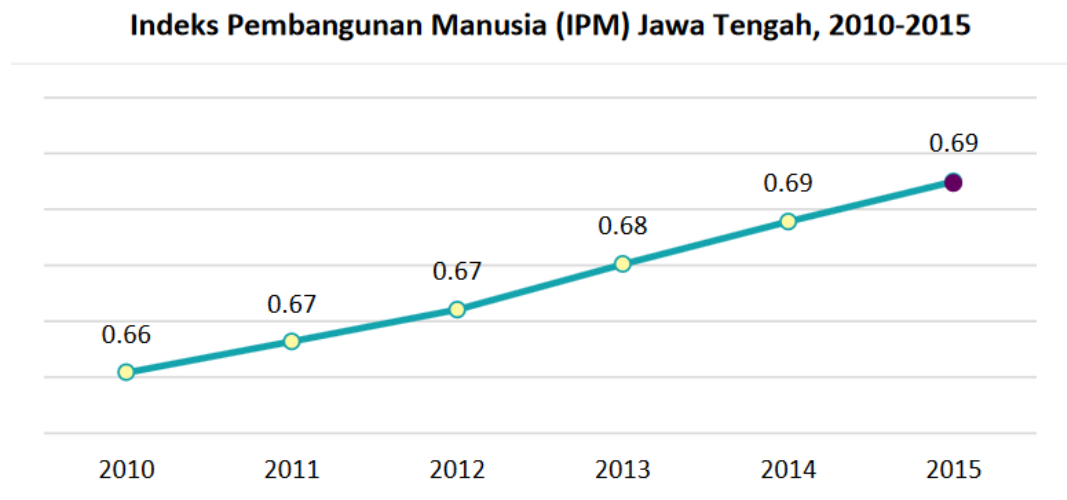
Sumber: Badan Pusat Statistik Banten, 2017

Gambar 1.2 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Banten 2010-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Barat, 2017

Gambar 1.3 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Jawa Barat 2011-2016



Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Tengah, 2017

Gambar 1.4 Grafik Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah 2010-2015

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia provinsi Banten dan DKI Jakarta lebih tinggi daripada provinsi lain. Dalam hal ini penulis tertarik ingin meneliti mengapa provinsi yang masuk dalam kategori sejahtera menurut indeks pembangunan manusia memiliki angka NPF yang tinggi dibanding provinsi yang masih masuk kategori sedang. Selain melihat dari indeks pembangunan manusia, penulis akan menggunakan 3 variabel makroekonomi juga untuk melihat faktor mana yang paling dominan dalam mempengaruhi pembiayaan bermasalah di tiap provinsi pulau Jawa. 3 variabel tersebut terdiri dari inflasi, produk domestik regional bruto, dan upah minimum provinsi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang faktor makro ekonomi apa saja yang berpengaruh terhadap NPF Bank Umum Syariah di 6 provinsi pulau Jawa dengan judul **“PENGARUH FAKTOR MAKRO EKONOMI DAERAH TERHADAP PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK UMUM SYARIAH di 6 PROVINSI PULAU JAWA”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh gejala makroekonomi terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di masing-masing 6 provinsi pulau Jawa?
2. Apa yang paling mempengaruhi pembiayaan bermasalah di masing-masing 6 provinsi pulau Jawa dari variabel inflasi, indeks pembangunan manusia, produk domestik regional bruto dan upah minimum provinsi?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh gejala makroekonomi terhadap pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah di 6 provinsi pulau Jawa
2. Untuk mengetahui variabel mana yang paling dominan dalam mempengaruhi NPF di masing-masing 6 Provinsi pulau Jawa (Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur)

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan tentunya mempunyai manfaat yang sekiranya dapat menambah kegunaan penelitian ini, seperti manfaat praktis dan manfaat teoritik, baik untuk diri peneliti, lembaga keuangan bank maupun peneliti lainnya. Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi sekaligus pengembangan di dalam ilmu ekonomi terutama ekonomi makro dan perbankan Islam bagi peneliti dan pembaca lainnya yang tertarik dan berminat untuk meneliti dengan topik yang sama.

2. Manfaat Praktis

Untuk kedepannya, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi Bank-bank Umum Syariah di pulau Jawa maupun seluruh Indonesia sebagai salah satu peringatan dini untuk mencegah besarnya nilai NPF/pembiayaan bermasalah yang diakibatkan oleh gejolak makro ekonomi yang tidak menentu setiap harinya.

3. Manfaat bagi peneliti

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan pemahaman sekaligus pengetahuan bagi penulis tentang pengaruh produk domestik regional bruto, indeks pembangunan manusia, inflasi, dan upah minimum provinsi terhadap *Non Performing Finance* (NPF) di Bank Umum Syariah dan juga untuk mengembangkan penelitian yang sesuai dengan topik tersebut.